

MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik) Vol. 5 No. 1 ISSN 2615-2142

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Fitri Yani

yanif1973@gmail.com.

Kantor Lurah Khairiah Mandah

Kodrat Sunyoto

Arini Sulistyowati

Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the Community Participation in Development in Khairiah Mandah Village, Indragiri Hilir Regency. The results showed that community participation in development generally colored the community to participate in development. If the participation is ideally classified, there are four aspects which are the ideal form of community participation in the Khairiah Mandah Kelurahan Indragiri Hilir Regency in development, namely participation in the form of ideas / thoughts (non-physical), money (funds), material (goods), and direct participation (energy / physical). Channeling ideas and contributing ideas can be channeled through existing formal institutions. Participation in the form of money donations is the participation of community members who voluntarily contribute money for development. Participation in the form of goods is carried out directly which is used for physical development. Participation in the form of personnel referred to here is how the community is involved directly or physically in the implementation of development. This is due to differences in abilities, differences between community members with one another.

Keywords: *participation, development*

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara umum mewarnai masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi tersebut apabila diklasifikasikan secara ideal, maka ada empat aspek yang bentuk ideal partisipasi masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembangunan yaitu partisipasi dalam bentuk ide/pemikiran (non fisik), uang (dana), materi (barang), dan partisipasi secara langsung (tenaga/fisik). Penyaluran ide-ide dan sumbangan pemikirannya dapat di salurkan lewat lembaga-lembaga formal yang ada. Partisipasi bentuk sumbangan uang adalah partisipasi anggota masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan uang untuk pembangunan. Partisipasi dalam bentuk barang dilakukan secara langsung yang digunakan untuk pembangunan yang bersifat fisik. Partisipasi dalam bentuk tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan, perbedaan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Kata kunci: partisipasi, pembangunan

PENDAHULUAN

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah kecamatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Instansi-instansi vertikal di daerah, maupun pemerintah itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah di seluruh

wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparat pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sehingga suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Berdasarkan hal di atas, berbagai hal diusahakan oleh Pemerintah Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berupa penyediaan bantuan yang menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam program pelaksanaan pembangunan. Pemberian kreatifitas, dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat di Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ikut berpartisipasi, dengan berbagai macam alasan. Hal ini disadari karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Disini diperlukan upaya

untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya pelaksanaan program pembangunan maksimal.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selain perhatian diharapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil, hendaknya pembangunan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang di butuhkan dan dirasakan oleh mereka. Demikian pula halnya dengan pembangunan di Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, nampaknya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama pembangunan sarana-sarana umum seperti jalan, jembatan, pos kamling, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sebagainya.

Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sarana ibadah dalam hal ini adalah pembangunan masjid. Dalam pembangunan tersebut masyarakat terlibat aktif mulai dari proses perencanaan hingga pada tahap pelaksanaan pembangunan, bahkan dana yang di gunakan pada pembangunan masjid tersebut merupakan swadaya masyarakat.

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu, diantaranya penelitian Muhammad Faisal Asariansyah (2013), dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis

partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan jalan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus permasalahan adalah Partisipasi Masyarakat Kecamatan Lawang pada pemerataan pembangunan infrastruktur jalan. Kesimpulan dari penelitian program bantuan pembangunan berbasis masyarakat (Bangsimas) memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada masyarakat pedesaan untuk menentukan arah dan tujuan ke depan yang diinginkan oleh masyarakat di masing-masing desa. Dengan optimalisasi potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat pedesaan menjadikan pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa dalam sebuah pembangunan juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan dalam kaitannya dengan pembangunan jalan dan pembangunan infrastruktur yang lainnya.

Selanjutnya penelitian Abdul Latif (2014), dengan judul Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Di Kecamatan Posigadan. Penelitian ini membahas peran partisipasi masyarakat dalam peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Posigadan dan Kabupaten Bolaang Mongondow, Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian deskriptif (descriptive research), dengan teknik pengumpulan data di lapangan menggunakan kuesioner dan wawancara. Adapun data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan dukungan data kuantitatif, di mana hasilnya akan dipaparkan dalam bilangan persentase dan tabel distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan masih kurang maksimal, terutama dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa. Masih kurang aktifnya masyarakat dalam setiap tahap pembangunan tersebut adalah

disebabkan karena masih kurang pemahamannya masyarakat desa akan pentingnya partisipasi.

Terakhir penelitian Stepanus Henryk (2013), dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Dari hasil penelitian diperoleh secara keseluruhan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dalam pembangunan fisik seperti partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana pendidikan yang masyarakatnya sudah terlibat langsung dalam menyalurkan aspirasinya dan terlibat langsung dalam perbaikan yang ada, sedangkan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana kesehatan yang masyarakatnya juga terlibat langsung dalam pembangunannya dan antusias dalam mengikuti program-program kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana jalan masyarakatnya sudah ikut langsung terlibat dalam pembuatan jalan. Dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik seperti menyumbangkan pemikiran dalam musyawarah masyarakat sudah cukup baik dalam memberikan saran-saran, sedangkan dalam partisipasi masyarakat dalam keterampilan berwirausaha pemerintah masih kurang dalam memberikan perhatian dan pembinaan sehingga masyarakat hanya berharap pada lapangan pekerjaan, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga sudah cukup baik dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Sungai Keledang.

TINJAUAN TEORETIS

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan

berbagai kegiatan (Panudju, 1999). Conyers (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini selaras dengan konsep man-centred development (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

Siahaan (2002:4), partisipasi masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, planning dan keuntungan lainnya, yaitu:

- 1) Dari pandangan sosial, keuntungan utamanya adalah untuk mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistik, tidak punya komitmen dan dalam kasus yang ekstrim teralienasi. Di dalam proses partisipasi ini, secara simultan mempromosikan semangat komunitas dan rasa kerjasama dan keterlibatan.
- 2) Dari segi politik, partisipasi lebih mempromosikan participatory

dibanding demokrasi perwakilan (representative democracy) sebagai hak demokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik secara umum, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik juga akan membantu dewan (counsellors) dan para pembuat keputusan lainnya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen mereka atau semua pihak yang akan terpengaruh, dan sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan jika ditangani secara tepat.

- 3) Dari segi planning, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan public interest dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal perencanaan.
- 4) Keuntungan lain dan public participation adalah kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan otoritas kota dan menggantikan perilaku they/we menjadi perilaku.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan riset/penelitian, dikarenakan instrumen yang digunakan adalah metode-metode riset. Kegiatannya berawal dari teknik pengumpulan data, analisis data sampai dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. Data yang dilapangan sebagai data penting dan utama yang akan dipakai dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk

melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. (Bratakusumah, 2004).

Proses perencanaan pembangunan dimulai dengan rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan formulasi rencana dan implementasinya, dapat diusahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi. Rencana dengan demikian merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi berdasar pada suatu rencana. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh untuk merealisasinya.

Kemudian perencanaan sebagai proses yang meliputi (Tjokroamidjojo, 1994:189) sebagai berikut: Proses perencanaan dapat dimulai dengan suatu rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti langkah-langkah kegiatan (*measure*) untuk merealisasinya.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi yang dimaksud seperti apa yang dirumuskan oleh Nyoman Bratha berikut ini : Mengikuti sertakan faktor-faktor kesadaran, minat dan bakat serta kreatif yang ada dalam kelompok untuk merencanakan dan

menyelesaikan pekerjaan yang ada pada kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan Buya Hamka mengemukakan bahwa :Partisipasi adalah mengambil bagian atau turut menyusun, turut melaksanakan dan turut bertanggung jawab.

Mencermati kedua kutipan tersebut, maka dapat kita ketahui ada enam hal yang pokok yang perlu kita kembangkan bila ingin memperoleh partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan. Adapun keenam hal tersebut adalah kesadaran, minat, kreatifitas, merencanakan atau menyusun dan melaksanakan. Apabila keenam hal tersebut dimiliki oleh masyarakat maka hal lain yang perlu diperhatikan adalah aspek kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah desa beserta aparatnya didalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

Kepemimpinan perlu dikemukakan disini karena antara partisipasi masyarakat dan kepemimpinan setempat tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan yang lainnya. Bila terpisahnya maka dengan sendirinya akan mengurangi atau bahkan kehilangan kekuatan. Misalnya partisipasi masyarakat besar, namun karena pemerintah desa tidak dapat menerapkan kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi setempat, maka potensi tidak akan pernah di wujudkan seperti yang diharapkan.

Dewasa ini diharapkan partisipasi masyarakat akan muncul dan tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan aktifitas yang lahir dari rasa tanggung jawab warga masyarakat dalam pembangunan pedesaan / kelurahan yang pada partisipasinya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Dari penjelasan itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidup di masa yang akan datang terutama bagi generasi penerus. Tanggapan, pengertian

dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan akan mempercepat terelisasi suatu tujuan. Hal itu dimungkinkan karena potensi besar dalam pembangunan tergantung banyak pada potensi sumber daya manusia dan memiliki kemampuan yang besar pula.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental itu sendiri. Karenanya untuk mendapatkan partisipasi masyarakat terutama pada tingkat desa harus diusahakan adanya perubahan sikap mental kearah perbaikan yang tanpa adanya tekanan-tekanan. Masyarakat juga harus merasa bahwa dalam pembangunan itu terdapat kebutuhan-kebutuhan mereka.

Partisipasi dari segenap pribadi-pribadi dalam masyarakat merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam pembangunan. Partisipasi menyebabkan terjalinnya kerjasama dalam masyarakat dan kerjasama ini perlu pengkoordinasian yang baik dari pimpinan, dalam hal ini dimaksudkan agar partisipasi tersebut berdaya guna secara efektif.

Koordinasi akan berjalan dengan baik apabila jalur-jalur komunikasi dalam masyarakat berjalan seimbang. Komunikasi yang dimaksudkan adalah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dalam masyarakat desa keadaan ini dapat terlaksana dengan baik apabila asas swadaya dan gotong-royong dilaksanakan secara masal dan menyeluruh dalam satu pola tertentu menggambarkan pencerminan kepentingan-kepentingan masyarakat dan individu-individu yang mendukungnya. Dengan demikian apa yang dilaksanakan sebagai proses pembangunan adalah merupakan milik bersama yang harus di pelihara dan di pertanggung jawabkan demi kesejahteraan bersama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok, mengenai peran serta masyarakat dalam proses perencanaan yang difokuskan pada perencanaan pembangunan di Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Mandah adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 1.479, 24 Km² atau 147,924 Ha. Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna pemerintahan telah mengadakan kembali struktur organisasi pemerintahan kecamatan.

Kecamatan Mandah telah dilaksanakan pembentukan dan penataan kembali susunan organisasi pemerintahan Kecamatan Mandah berdasarkan struktur organisasi pola minimal yang sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor 218 Tahun 1997 dan Keputusan Mendagri No. 20 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Camat Mandah dibantu oleh Sekretaris Camat beserta 3 Kasubbag (Kasubbag Administrasi dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan serta Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian), 5 Kasi

(Kasi Umum, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Kesejahteraan Sosial, serta Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum) dan beberapa Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kecamatan Mandah. Pada tahun 2011, Kecamatan Mandah mengalami pemekaran desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2011, sehingga Kecamatan Mandah terdiri 1 kelurahan dan 16 desa pada tahun 2015.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

1. Partisipasi Non Fisik (Ide-Ide / Pemikiran)

Keberhasilan suatu pembangunan, bagaimana bentuk dan hasilnya tidak dapat dilepaskan oleh adanya putusan-putusan yaitu melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Pada tahap-tahap tertentu keterlibatan masyarakat sangatlah di butuhkan mengingat ide-ide atau pemikiran dapat menjadi bahan pertimbangan.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik adalah bagaimana masyarakat terlibat dalam memberikan buah pikirannya dalam proses pembangunan. Partisipasi dapat di wujudkan pada berbagai macam kesempatan, seperti melalui pertemuan / rapat, melalui surat / saran dan tanggapan terhadap proses pembangunan.

Penyaluran ide-ide dan sumbangan pemikirannya dapat di salurkan lewat lembaga-lembaga formal yang ada. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembangunan dengan bentuk Ide/Pemikiran, maka dapat dilihat pada keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat dan keaktifan dalam memberi pendapat dan saran dalam pertemuan.

Berdasarkan wawancara langsung terhadap beberapa responden maka diketahui bahwa rata-rata responden

yang menyatakan kurang aktif mengikuti rapat dan memberikan pendapat dan sarannya karena mereka selalu di undang oleh pemerintah kecamatan untuk rapat. Selain itu karena adanya kesadaran pribadi untuk membantu terlaksananya pembangunan. Alasan lain yang diperoleh sehingga responden kurang aktif dan tidak aktif dalam memberikan saran atau pendapatnya karena mereka tidak pernah diundang di samping itu ada juga masyarakat yang pasif mengikuti rapat karena tidak mempunyai kemampuan berbicara di depan umum.

2. Partisipasi Dalam Bentuk Sumbangan Uang

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Camat Mandah bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir menelan biaya yang cukup besar dan dana yang digunakan lebih banyak dari swadaya masyarakat dibandingkan dengan dana yang berasal dari bantuan Inpres Kecamatan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui responden dalam penelitian serta pengalaman langsung peneliti, diketahui bahwa partisipasi dalam bentuk uang mencapai frekuensi sedang karena untuk menyumbang dalam bentuk uang sangat mudah prosedurnya dan tidak banyak menyita waktu maupun tenaga. Kenyataan seperti itu memberikan indikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk uang sebagai suatu bagian partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan bahwa kesadaran akan pembangunan membutuhkan dana yang cukup.

Dalam setiap bulannya biasanya masyarakat memberikan sumbangan untuk kegiatan pembangunan terutama dalam hal pembangunan fisik, dan masyarakat dalam memberikan sumbangan bukan karena adanya paksaan dari pemerintah atau dari pihak lain tetapi karena adanya kesadaran untuk membangun daerahnya. Jadi sumbangan yang diberikan

masyarakat dalam bentuk uang tergantung dari pendapatan masyarakat itu sendiri.

3. Partisipasi dalam Bentuk Materi (Barang)

Sumbangan materi (barang) biasanya dilakukan secara langsung. Dimana sumbangan materi (barang) tersebut diperuntukkan untuk pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan mesjid, jembatan, perbaikan jalan dan sarana-sarana umum lainnya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk materi (barang) berada dalam kategori sangat rendah, karena berdasarkan wawancara langsung dengan responden mengatakan bahwa masyarakat lebih banyak menyumbangkan dalam bentuk uang (dana). Alasan lain yang diungkapkan responden bahwa untuk menyumbang dalam bentuk materi prosedurnya agak menyita waktu dan tenaga. Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa responden bahwa barang yang disumbangkan dalam pembangunan, biasanya dalam bentuk seperti pasir, batu, kayu papan dan kayu balok.

4. Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga

Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut hasil pengamatan bakti atau gotog royong sekali dalam seminggu atau minimal dua kali dalam sebulan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu seperti membersihkan saluran air, perbaikan jalan, membersihkan kantor Kelurahan, serta kegiatan yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat.

Waktu yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong hanya dua sampai tiga jam saja dan setelah itu mereka melanjutkan pekerjaan rutin mereka. Untuk mengetahui partisipasi

masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk tenaga dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan kerja bakti. Seperti data yang diperoleh melalui responden, diketahui bahwa kegiatan yang melibatkan fisik atau tenaga masyarakat seperti gotong royong dalam membersihkan saluran air, perbaikan lansung masyarakat. Partisipasi pembangunan tidak hanya pada saat pelaksanaan. Tapi juga perawatan dan pemeliharaan bangunan juga tetap merupakan partisipasi dari pembangunan.

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti data yang diperoleh melalui responden dalam penelitian ini diketahui bahwa partisipasi dalam bentuk fisik yang sifatnya seperti gotong royong adalah merupakan suatu tradisi yang sudah turun-temurun bagi masyarakat kecamatan/ desa. Alasan lain adalah adanya suatu kebersamaan bagi masyarakat untuk membangun daerahnya.

Berdasarkan penguraian tentang empat bentuk partisipasi masyarakat tersebut, maka secara umum dapat kita menganalisa bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembangunan dengan mengukur partisipasinya dalam bentuk ide/pikiran, uang, materi (barang) dan tenaga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

1. Faktor Kesadaran /Kemauan

Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya pembangunan itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi

cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan warga masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan lokasi penelitian ini.

Untuk melihat bagaimana kesadaran masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan pembangunan diperoleh gambaran bahwa masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berpartisipasi dalam pembangunan disegala bentuk (ide/pikiran, uang, materi/barang, dan tenaga) adalah merupakan bagian besar dari kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat. Alasan responden memberikan jawaban faktor kesadaran pribadi yang merupakan pendorong masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan karena adanya suatu kepedulian atau kesadaran untuk ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan tersebut. Indikasi ini memperlihatkan bahwa betapa besar kesadaran masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Faktor Pendidikan

Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Pembangunan dalam bentuk ide dan pikiran biasanya dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan juga banyak di antara yang hadir dalam rapat-rapat pembahasan pembangunan yakni orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi.

Melihat kenyataan ini maka jelas bahwa tingkat pendidikan masyarakat turut berpengaruh terhadap

partisipasinya dalam pembangunan yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula partisipasinya dalam pembangunan, khususnya dalam pemberian ide-ide / pikiran.

3. Faktor Kepemimpinan Pemerintah

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa partisipasi masyarakat dan pembangunan di Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir pada khususnya tidak timbul begitu saja melainkan terpengaruh oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat. Karena masyarakat adalah merupakan paduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat/karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah kelurahan. Kepemimpinan yang baik adalah kemampuan untuk menyatukan berbagai karakter di masyarakat yang dipimpinnya dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Berhasilnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan diperlukan adanya kepemimpinan yang dapat menyatu dengan sikap dan karakter masyarakat setempat, karena dengan kepemimpinan yang baik dan terarah oleh pemerintah maka jelas akan mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan kebijaksanaan dalam pembangunan akan dilaksanakan dengan baik tanpa merasa unsur paksaan atau keterpaksaan.

4. Peralatan / Fasilitas

Dalam pelaksanaan tugas kepala Kecamatan dan perangkatnya, dibutuhkan kantor Kecamatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya. Kantor Kecamatan sebagai pusat kegiatan pemerintah Kecamatan merupakan

sarana yang sangat penting bagi kepala Kecamatan dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai seorang pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik sehingga dapat tercipta berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Perlengkapan kantor kecamatan adalah semua peralatan untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan pemerintah. Secara keseluruhan pada lokasi penelitian perlengkapan dikantor kecamatan sudah memadai. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah, khususnya pada upaya peningkatan pelayanan administrative kepada masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis, peralatan / fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepala kecamatan dan aparatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

SIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berbentuk ide / pikiran tergolong rendah. Partisipasi dalam pembangunan yang berbentuk uang (dana) tergolong dalam kategori sangat tinggi. Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang (materi) berada dalam kategori sangat rendah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang disumbangkan secara fisik (tenaga) tergolong tinggi.

Berdasarkan capaian masing-masing bentuk partisipasi tersebut, maka secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir adalah tergolong tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, misalnya tingkat pendidikan masyarakat, yang paling penting adalah

adanya kesadaran diri masyarakat secara pribadi yang dilandaskan pada agama yang dianutnya. Faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan disekitar diluar diri masyarakat yang meliputi kepemimpinan dan peralatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. Perencanaan Daerah Partisipatif. Pondok Edukasi. Solo.
- Asariansyah, Muhammad Faisal. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1141-1150
- Bajuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono, 2002, Kebijakan Publio Konsep dan Strategi JLP UNDIP Semarang.
- Henryk, Stepanu. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2013,1 (2): 612-625 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 050-187/kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- Kunarjo. 2002. Perencana dan Pengendalian program Pembangunan. UI Press. Jakarta.
- Kuncoro, Mudradjad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga
- Latif, Abdul. 2014. Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Di Kecamatan Posigadan, *Jurnal Madani*, Vol 4. No 1. Juni 2014 (ISSN: 2087-8761)
- Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sumaryadi, Nyoman, I. 2000. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, CV Cita Utama. Jakarta
- Thoha Miftah. 2000. Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang Undang No. 33 tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 j.o Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

